



Kerja Sama Taiwan-Amerika Serikat Dalam Menghadapi Ancaman China Periode 2016-2020

Aisyah Saharani¹, Hesti Rosdiana²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12450

hesti.rosdiana@upnvj.ac.id

Abstract. *Taiwan is considered as a renegade province by China. Taiwan, however, disagrees and trying to raise public awareness that it is a sovereign nation. Tensions have increased since the election of Tsai Ing-wen as president of Taiwan in 2016. China's military activity has increased since then, marked by warplane flights around Taiwan to military exercises in the border area. The final results of this study show that Taiwan sees China's increased military activity as a threat and tries to balance the threat through military cooperation and diplomacy. Taiwan made an alliance with the US through the US-ROC Mutual Defense Treaty which later became the Taiwan Relations Act in 1979 due to the birth of the One China Policy. Taiwan tried to maintain the Status Quo with China while gathering support and recognition from other countries through military cooperation and diplomacy.*

Keywords: *Taiwan, AS, China, Military Cooperation, Balance of Power.*

Abstrak. Taiwan dianggap sebagai provinsi pemberontak oleh China. Namun Taiwan tidak sependapat dan berusaha meningkatkan kesadaran publik bahwa mereka adalah negara yang berdaulat. Tensi meningkat sejak terpilihnya Tsai Ing-wen sebagai presiden Taiwan pada tahun 2016. Aktivitas militer China meningkat sejak saat itu ditandai dengan penerbangan pesawat tempur disekitar Taiwan hingga latihan militer di wilayah perbatasan. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa Taiwan melihat peningkatan aktivitas militer China ini sebagai ancaman dan berusaha menyeimbangkan ancaman tersebut melalui upaya kerjasama militer dan diplomasi. Taiwan melakukan aliansi dengan AS melalui US-ROC Mutual Defense Treaty yang kemudian menjadi Taiwan Relations Act pada tahun 1979 imbas dari lahirnya One China Policy. Taiwan berusaha mempertahankan Status Quo dengan China sembari mengumpulkan dukungan dan pengakuan dari negara lain melalui kerjasama militer dan diplomasi.

Kata kunci: Taiwan, AS, China, Kerjasama militer, *Balance of Power*

1. LATAR BELAKANG

Bermula saat terjadinya perang saudara tahun 1917 di daratan China yang melibatkan dua kelompok, yakni Kuomintang yang beraliran nasionalis melawan Partai Komunis China (PKT). Saat itu pemimpin Kuomintang, Chang Kai-sek terus melakukan pengejaran terhadap tentara PKT di China bagian Selatan dan Timur. Pada masa pengejaran ini, PKT melakukan pergantian pemimpin dan memilih Mao Zedong sebagai ketua baru PKT. Mao Zedong berhasil mengalahkan Kuomintang dan PKT menjadi penguasa tunggal daratan China. Kekalahan tersebut memaksa sisa-sisa prajurit Kuomintang yang teguh dengan ideologi nasionalis-nya hengkang dari China dan pindah ke pulau Formosa atau yang sekarang disebut sebagai Taiwan (Gettings, 2020).

Hubungan kedua negara masuk ke puncak ketegangan setelah Tsai Ing Wen terpilih sebagai presiden Taiwan pada pemilu 2016. Tsai berasal dari Partai Progresif Demokratik

(DPP). Upaya kemerdekaan inilah yang menjadi warna khas dari DPP dan menjadikan DPP untuk pertama kalinya mendominasi legislatif Taiwan pada tahun 2016. Tsai dan DPP terlalu vokal dalam menyuarakan Taiwan sebagai negara yang berdaulat. Hal ini memicu ketegangan konflik yang kian intens di Selat Taiwan, berbatasan langsung dengan China. Aktivitas militer China dilaporkan meningkat setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya anggaran militer Taiwan.

Terhitung sejak kemenangan Tsai, jumlah patroli militer yang dilakukan China di sekitaran Taiwan meningkat bila dibandingkan pada periode sebelumnya. Peningkatan ini kontras, mengingat periode sebelumnya disebut sebagai “Golden Time” hubungan Taiwan-China di bawah Presiden Taiwan Ma Ying-jeou. Pesawat militer hingga jet tempur China tercatat telah melakukan penerbangan di wilayah udara sekitaran Taiwan dan Jepang dari November 2016. Pesawat militer China Pada 10 Desember 2016 terbang di atas Laut Cina Timur di sebelah selatan Pulau Okinawa Jepang dan mengitari wilayah udara internasional di sekitar Taiwan sebelum melewati Selat Bashi untuk kembali ke China, kata pejabat dari Kementerian Pertahanan Nasional (Pan, 2016).

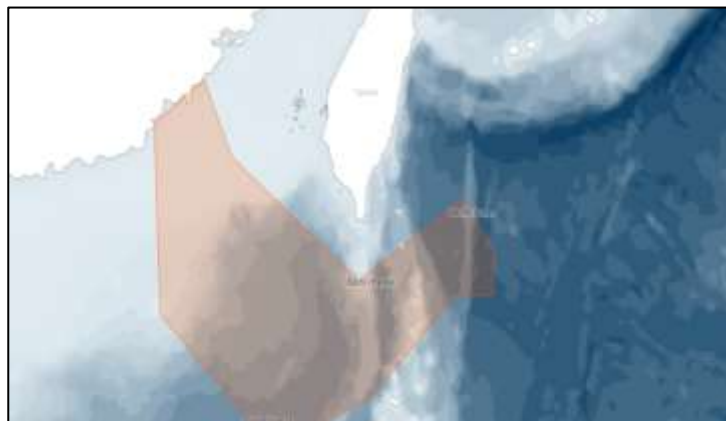
Dari dua belas pesawat yang terbang, hanya empat yang menempuh jalur penerbangan di sekitar Taiwan. Diketahui pesawat yang berpartisipasi dalam penerbangan tersebut adalah dua pesawat pengebom Xian H-6K, sebuah pesawat pengintai Tupolev Tu-154 dan sebuah pesawat angkut taktis Shaanxi Y-8. Dalam penerbangan ini dilaporkan pesawat tersebut dikawal oleh beberapa jet tempur Su-30 yang datang dari utara saat melintasi Selat Miyako sesuai prosedur Angkatan Udara PLA untuk terbang melewati gugus pulau pertama, kemudian mengawal saat telah mencapai wilayah udara selatan Taiwan saat mereka terbang di atas Selat Bashi antara Taiwan dan Filipina, sebelum mengakhiri misi dan kembali ke pangkalan mereka (Pan, 2016)

Diketahui juga bahwa tidak ada penerbangan yang melanggar wilayah udara teritorial Taiwan maupun Jepang. Pada September 2016, China mengumumkan bahwa mereka akan melakukan latihan rutin untuk terbang melewati gugusan pulau pertama, karena China berusaha untuk menegaskan kehadirannya di pulau-pulau yang disengketakan dan wilayah laut di Laut Cina Selatan dan Timur.

Pada bulan Oktober 2017, dalam pidatonya di Kongres Partai Komunis ke-19, Presiden Xi Jinping mengumumkan bahwa pada tahun 2049, peringatan 100 tahun berdirinya RRT, China akan mencapai “peremajaan besar bangsa China” dan akan menjadi “negara sosialis yang kuat, demokratis, beradab, harmonis, dan modern.” (Legarda & Nouwens, 2018).

Terhitung dari Oktober 2020 hingga Oktober 2021, 843 Pesawat PLA dilaporkan terbang melintasi Air Defense Identification Zone (ADIZ) Taiwan. Sejak akhir tahun 2020, pesawat PLA memasuki ADIZ Taiwan rata-rata 18 hari per bulan. Sebagian besar latihan PLA dilakukan pada siang hari, tetapi ada 11 kali latihan malam hari yang dilaporkan. Ini menunjukkan bahwa PLA sedang mengembangkan kemampuan tempur dalam segala cuaca (Shih et al., 2021).

Jumlah pesawat terbesar adalah jet tempur, yang dapat terlibat dalam pertempuran udara-ke-udara dan pengebom pengawal, pesawat anti-kapal selam, dan pesawat perang elektronik. PLA juga telah mengerahkan pesawat pengebom, yang dapat terlibat dalam pertempuran udara-ke-darat. Lebih dari 40% pesawat PLA adalah pesawat anti-kapal selam dan pesawat perang elektronik yang tidak bersenjata dan berspesialisasi dalam mengumpulkan informasi intelijen dan memantau pergerakan kapal selam. Satu atau dua pesawat ini sering dikerahkan setiap hari (Shih et al., 2021).



Gambar 1. Rute Penerbangan Pesawat PLA disekitar Taiwan

Dimulai dari 2016 hingga 2020, China banyak melakukan aktivitas ofensif yang mengancam kedamaian kasawasn Selat Taiwan. Dengan penangguhan komunikasi China-Taiwan tepat setelah kemenangan Tsai hingga ratusan pesawat tempur yang terbang disekitaran perairan Taiwan dalam satu tahun dan latihan militer dikawasan perbatasan menunjukan keseriusan China dalam upaya reunifikasi untuk mewujudkan “peremajaan China”. Ancaman yang datang dari China ini tidak hanya sebagai miss perception namun betul adanya (Jervis, 2017).

Melihat ini, Taiwan sebagai negara yang menjadi salah satu alasan kebangkitan kekuatan militer China, sangat merasa terancam. Merasa bukan bagian dari China, jelas Taiwan berusaha mencari ‘kekuatan’ untuk menyeimbangkan ancaman. Taiwan semakin mendekatkan diri dengan AS setelah Tsai terpilih. AS pun mendekatkan diri ke Taiwan

karena melihat dominasi China yang kian besar. Adapun hubungan keduanya memang telah terjalin dari periode perang dingin.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam Hubungan Internasional, pembentukan aliansi merupakan hasil interaksi yang entitas-entitas politik yang berdaulat yang didorong oleh kepentingan untuk mendominasi atau menyeimbangkan kekuatan. Menurut Stephen Walt, aliansi dibentuk oleh negara-negara untuk melindungi diri mereka sendiri dari negara atau koalisi yang memiliki sumber daya yang lebih unggul yang dapat menjadi ancaman (Walt, 1987). Negara-negara yang lebih lemah umumnya membentuk aliansi untuk menyeimbangkan kekuatan dan bagi John Mearshmeier, negara-negara yang lebih kuat terkadang membentuk aliansi untuk 'meningkatkan bagian mereka dari kekuatan dunia' (Mearsheimer, 2001). Arnold Wolfers mendefinisikan aliansi sebagai janji bantuan militer timbal balik antara dua atau lebih negara berdaulat.

Aliansi merupakan instrumen untuk mengelola dilema keamanan (Waltz, 1979). Aliansi membantu mengurangi ketidakpastian di antara negara-negara. Aliansi meningkatkan persepsi secara positif dalam arti mengurangi ketidakpastian tentang apa yang akan dilakukan oleh negara lain. Ketidakpastian, atau disebut juga sebagai bayangan masa depan, adalah faktor kuno yang menyebabkan dilema keamanan.

Kekhawatiran di masa depan mungkin akan membatasi perilaku negara. Ketidakpastian tentang niat negara lain tidak dapat dihindari, yang berarti bahwa negara tidak pernah dapat memastikan bahwa negara lain tidak memiliki niat ofensif yang sejalan dengan kemampuan ofensif mereka. Ketidakpastian tersebut merupakan hasil dari kedaulatan dan anarki yang saling membentuk (Mearsheimer, 2001). Dilema keamanan (dilema bahwa semakin banyak negara mencari keamanan, semakin tidak aman mereka menjadi) memaksa negara-negara untuk membentuk aliansi baru atau memperkuat aliansi yang sudah ada (Jervis, 1978).

Sesuai dengan persepsi neorealis terhadap sistem internasional yang anarki, maka negara dipaksa untuk survive (Waltz, 1979). Di dunia tanpa otoritas yang lebih tinggi dari negara, membuat negara harus berdiri diatas kakinya sendiri dan bertahan hidup. Waltz meyakini bahwa salah satu cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan kerjasama. Dan negara itu rasional, yang artinya kerjasama hanya akan dilakukan bila itu menguntungkan.

Di dalam sistem internasional yang anarki, ketidakpastian adalah sebuah hal yang pasti. Sebuah negara tidak tahu sikap apa yang akan negara lain ambil dalam merespon anarkisme sistem internasional, sehingga mereka berlomba-lomba menciptakan strategi yang mampu

menjaga keamanan negara masing-masing. Hal ini juga berkaitan dengan konsep ancaman yang dicetuskan oleh Stephen Walt. Ancaman adalah konsep yang lebih luas daripada kekuasaan, karena mencakup target agregat, kemampuan ofensif, dan pengaruh kekuatan kekuasaan. Ketika dihadapkan dengan ancaman eksternal yang signifikan, aliansi adalah salah satu cara yang dapat diperhitungkan oleh negara.

Melalui penjelasan tersebut, Taiwan meningkatkan kapabilitas militernya dan menjalin kerjasama dengan AS dan negara lain untuk membendung ancaman yang datang dari Beijing. Taiwan, sebagai entitas yang lebih lemah dibanding dengan China, melakukan aliansi dengan negara yang lebih kuat untuk menyeimbangkan ancaman (Balance of Threat).

Balance of threat theory adalah kondisi dimana negara-negara membentuk aliansi untuk menyeimbangkan ancaman (Walt, 1987). Negara menyatakan sekutu untuk menyeimbangkan kekuasaan dan melawan ancaman. Terdapat tiga indikator yang mempengaruhi negara melakukan aliansi (Walt, 1985). Yang pertama adalah munculnya keinginan untuk melakukan perimbangan atau balancing terhadap kekuatan tersebut. Walt mengatakan bahwa negara cenderung membentuk aliansi untuk melakukan perimbangan terhadap kekuatan besar tersebut. Kemudian yang kedua adalah negara melakukan aliansi untuk mendapatkan keuntungan keamanan (Walt, 1985), dan terakhir adalah persamaan ideologi yang menimbulkan perasaan senasib (Walt, 1985). Melalui tiga faktor tersebut, maka Walt menyimpulkan bahwa aliansi yang dibentuk oleh negara-negara merupakan respon dari ancaman dengan tujuan untuk mengamankan dirinya.

Melalui penjelasan tersebut, Taiwan meningkatkan kapabilitas militernya dan menjalin kerjasama dengan AS dan negara lain untuk membendung ancaman yang datang dari Beijing. Taiwan, sebagai entitas yang lebih lemah dibandingkan dengan China, melakukan aliansi dengan negara yang lebih kuat untuk menyeimbangkan ancaman.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti ambil adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, berusaha untuk menjelaskan secara lebih detail dan terstruktur mengenai permasalahan atau peristiwa yang terjadi. Proses dalam pengkajian masalah itu sendiri digunakan metode kualitatif yang muncul pada inkuiri, pengumpulan data dalam situasi alami yang tidak terlepas dari hal situasi dan tempat penelitian, juga digunakannya analisis data yang bersifat induktif dan mencoba untuk membentuk pola atau tema tertentu (Creswell, 2013).

Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian ini menjadi sangat relevan dengan penelitian ini karena mampu dan berusaha untuk menjabarkan masalah yang ini ditelusuri tentang

bagaimana upaya Taiwan dalam kersajama dengan AS dalam menghadapi China sebagai ancaman di Selat Taiwan periode 2016-2020.

Dalam pengumpulan data primer untuk tulisan ini, peneliti telah mengumpulkan data dari dokumen resmi pemerintah Taiwan, AS, dan China. Pengamatan juga dilakukan dengan mengamati pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh ketiga pemimpin negara secara langsung maupun diwakilkan oleh menteri luar negeri mereka, ataupun pihak lain yang terlibat. Penulis juga telah mengumpulkan data melalui dokumen berupa artikel, jurnal dan berita di media cetak dan online di lingkup nasional maupun internasional yang memberikan informasi mengenai hubungan ketiga negara ini. Selain itu penulis tentunya telah mengamati dan melakukan studi literatur dari penelitian terdahulu yang masih relevan dan berhubungan dengan topik yang penulis angkat serta sifatnya mendukung data hasil penelitian penulis. Adapun peneliti menggunakan sintesa pemikiran dari dua konsep yakni *Balance of Threat* dan Aliansi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Taiwan dan AS mulai terjalin pada periode perang dingin. AS berupaya membendung pengaruh komunis di wilayah Asia. Taiwan yang memiliki ideologi demokrasi dan liberal serta berkonflik dengan China yang memiliki aliran komunis, menjadi rekanan yang sangat sesuai untuk AS di kawasan Asia Timur. Pada tahun 1950an hingga 1970an, ribuan tentara AS ditempatkan di Taiwan sebagai bentuk perlawanan terhadap serangkaian serangan China (Curtis & King, 2023).

Dukungan AS untuk Taiwan dipertegas dengan pembaharuan kerjasama militer US-ROC Mutual Defense Treaty pada tahun 1954 dengan isi mengenai bantuan militer AS ke Taiwan, jaminan keamanan dan keberlangsungan pemerintahan Taiwan, hingga aliansi militer dengan AS di Asia Pasifik (“TAIWAN RELATIONS ACT,” 2022).

Hubungan militer antara Taiwan dan AS mengalami pembaharuan ketika China mengeluarkan kebijakan One China Policy. Semua mitra diplomatik China harus mengakui Taiwan adalah bagian dari China. Melalui peraturan ini, Washington yang merupakan salah satu mitra resmi China, dituntut memilih untuk tetap menjalin hubungan resmi dengan Beijing atau menyakatakan kemerdekaan Taipei. Ini merupakan pilihan yang sulit bagi AS mengingat baik China maupun Taiwan adalah rekanan yang penting.

Sebagai jawaban akan dilema tersebut, AS dibawah pemerintahan Jimmy Carter memperbarui hubungannya dengan Taiwan, khususnya dalam kerjasama militer. US-ROC Mutual Defense Treaty diputuskan untuk tidak lagi berlanjut, namun diganti dengan Taiwan

Relation Act (TRA) yang mengatur hubungan antara AS dan Taiwan setelah tahun 1979. Adapun secara garis besar isi dari undang-undang ini ialah AS merupakan sekutu tidak resmi Taiwan yang akan mempertimbangkan upaya untuk menentukan masa depan Taiwan dengan cara lain selain damai, termasuk dengan boikot atau embargo, ancaman bagi perdamaian dan keamanan kawasan di wilayah Pasifik Barat. TRA juga mengatur penjualan senjata AS ke Taiwan yang ditujukan untuk “dikurangi” seiring berjalannya waktu, maksudnya adalah AS tidak akan menjual keperluan militer ke Taiwan melebihi penjualan sebelumnya.

Meskipun TRA tidak mewajibkan AS untuk ikut membela Taiwan, namun TRA mengharuskan AS untuk mempertahankan kapasitas melakukan hal tersebut, sehingga sejatinya TRA mengizinkan AS untuk melakukan intervensi apabila dibutuhkan namun tidak dinyatakan secara eksplisit. Pernyataan ini juga menegaskan kepentingan AS terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan mencatat bahwa penggunaan kekuatan, boikot, atau embargo terhadap Taiwan akan menjadi perhatian besar bagi AS (Gordon et al., 2023).

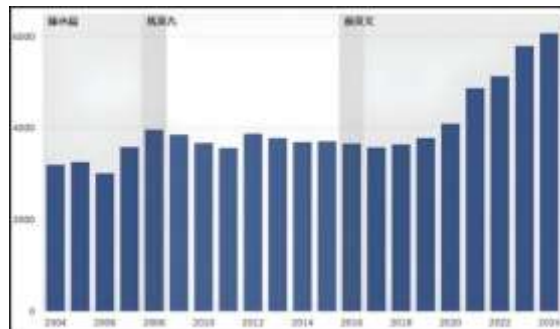
Selain TRA, kerjasama keamanan antara AS dan Taiwan juga diwujudkan melalui Six Assurance. Pada tahun 1982, AS dan China melakukan negosiasi mengenai penjualan senjata ke Taiwan melalui Joint Communique. Pemerintah Taiwan mengusulkan enam poin kebijakan kepada AS sebagai pedoman dalam melakukan hubungan AS - Taiwan. AS menyetujui poin-poin tersebut, kemudian menyampaikan persetujuan ini kepada Taiwan, dan pada akhir Juli 1982, menginformasikan kepada Kongres tentang perjanjian tersebut (“Taiwan Document Project,” n.d.).

Pada masa kepemimpinan Donald Trump (2016-2020), untuk memfasilitasi penjualan senjata ke Taiwan, pemerintahan Trump memudahkan proses transaksi senjata dengan langsung meninjau permintaan pembelian segera setelah permintaan itu dibuat dan mengumumkan hasilnya satu per satu (Shusen, 2022).

Adapun Tsai Ing-wen juga melakukan perubahan terkait prosedur pengadaan senjata dari AS. Pada prosedur sebelumnya, Taiwan akan mengirimkan ‘Surat Permintaan Harga dan Ketersediaan’, setelah mendapat persetujuan dari AS, ‘Surat Permintaan Surat Penawaran dan Penerimaan’ (LOA) akan dikirim. Untuk mengurangi jangka waktu dan menyederhanakan proses, langkah pertama telah dihapus dan LOA dapat dikirim secara langsung (Shusen, 2022).

Kedekatan antara Trump dan Tsai terlihat pada jumlah penjualan senjata AS. Pada era Trump, total transaksi senjata ke Taiwan merupakan yang paling tinggi di antara para presiden AS sejak pembentukan hubungan diplomatik resmi antara China dan AS. Terhitung ada 11 penjualan senjata senilai lebih dari \$18 miliar (Shusen, 2022).

Peningkatan penjualan senjata tersebut juga didorong oleh ketegangan di Selat Taiwan yang semakin panas karena terpilihnya Tsai Ing-wen dari partai DPP yang dengan tegas menolak reunifikasi Taiwan dengan daratan China. Merasa terancam dengan semakin masifnya aktivitas militer di wilayah perbatasan Taiwan-China, Taipei segera melakukan balance of threat terhadap Beijing yang mengarah pada pembelian lebih banyak senjata ofensif dari pemerintahan AS. Berikut adalah grafik anggaran pertahanan Taiwan sepanjang tahun 2004-2024:



Grafik 1. Anggaran pertahanan Taiwan dari tahun 2004 hingga 2024

1. 2019: NTD \$240.4 miliar (USD \$7.55 miliar)
2. 2020: NTD \$351.2 miliar (USD \$11 miliar)
3. 2021: NTD \$361.7 miliar (USD \$11.36 miliar)
4. 2022: NTD \$367.6 miliar (USD \$11.54 miliar)
5. 2023: NTD \$415.1 miliar (USD \$13 miliar)
6. 2024: NTD \$440.6 miliar (USD \$13.8 miliar)

Walaupun sempat turun pada tahun 2017, namun anggaran pertahanan Taiwan mengalami peningkatan yang konsisten sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kemampuan militernya di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Tren ini jelas menunjukkan kemungkinan pertumbuhan anggaran pertahanan yang akan terus berlanjut. Pada akhir tahun 2020, pemerintahan Trump secara resmi memberi tahu Kongres tentang potensi pembelian alutsista senilai lebih dari USD \$18 miliar oleh Taiwan, dengan alokasi dana senilai USD \$8 miliar pada tahun 2019 untuk pesawat tempur F-16 yang merupakan pemberitahuan terbesar sejauh ini (“Forum on the Arms Trade,” 2024). Pada 20 Agustus 2019, pemerintahan Trump secara resmi memberi tahu Kongres tentang kemungkinan penjualan 66 pesawat tempur F-16 ke Taiwan senilai USD \$8 miliar, hal ini jelas menarik perhatian yang lebih besar pada penjualan persenjataan AS-Taiwan.

Pada saat pemberitahuan F-16 pada tahun 2019, hubungan lintas selat tampak sangat tegang. Tsai Ing-Wen, secara terbuka mengkritik konsensus “satu negara, dua sistem” yang

dipandang oleh Beijing sebagai jaminan bahwa Taiwan tidak akan mencari kemerdekaan penuh. Xi Jinping membalas kecenderungan pro-kemerdekaan Tsai dengan menekan negara-negara untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan dan menempatkan tekanan keuangan pada investasi China dan pengeluaran pariwisata di Taiwan (“Forum on the Arms Trade,” 2024).

Pelonggaran secara bertahap dari transfer senjata defensive ke ofensif telah menjadi karakteristik baru dari kebijakan AS tentang penjualan senjata ke Taiwan (Shusen, 2022). Pada bulan April 2018, Departemen Luar Negeri AS menyetujui lisensi pemasaran yang memungkinkan perusahaan pertahanan AS untuk menjual teknologi sensitif yang diperlukan untuk membangun kapal selamnya sendiri kepada Taiwan.

Ketegangan yang terjadi di selat Taiwan jauh dari kata tenang setelah memenangkan kembali kursi kepresidenan pada pemilu Taiwan tahun 2021. Tercatat bahwa pada 15 Juni 2021, 28 pesawat China terbang melintasi wilayah udara Taiwan, ini merupakan rekor tertinggi.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, China menerbangkan sekitar 80 pesawat melalui wilayah udara Taiwan, sekali lagi memecahkan rekor serangan mendadak terbesarnya. Pada tanggal 7 Oktober, Wall Street Journal melaporkan bahwa Marinir AS dan pasukan operasi khusus dikerahkan ke Taiwan, di mana mereka telah melatih pasukan angkatan darat dan angkatan laut Taiwan selama kurang lebih satu tahun. Sehari setelah berita itu muncul, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan kembali janji China untuk “mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya.” (“Forum on the Arms Trade,” 2024).

Pada tanggal 2 November 2021, Senator Josh Hawley (R-MO) memperkenalkan Arms Taiwan Act of 2021. Undang-undang tersebut diusulkan akan membentuk “Inisiatif Bantuan Keamanan Taiwan” baru yang akan memberikan bantuan keamanan senilai USD \$3 miliar kepada Taiwan per tahun untuk mendukung pertahanan Taiwan yang “asimetris”. Undang-undang tersebut juga akan membuat bantuan tersebut bersyarat bahwa Taiwan harus membelanjakan setidaknya 3% dari PDB nasionalnya untuk pertahanan (“Forum on the Arms Trade,” 2024). Kebijakan ini tentu sangat membantu Taiwan dalam mengamankan dirinya dan dapat menutup celah kelemahan pertahanan Taipei.

Diperkirakan bahwa anggaran belanja militer Taiwan akan menyentuh angka NTD \$231,85 miliar (USD \$7,28 miliar), dengan pengeluaran tahunan rata-rata melebihi NTD \$50 miliar (USD \$1,57 miliar) di tahun 2024-2027. Dilaporkan bahwa Taiwan akan menggelontorkan anggaran militer secara keseluruhan menjadi sekitar 2,5 persen dari PDB

(Dotson, 2023). Peningkatan signifikan dalam anggaran militer Taiwan selama lima tahun terakhir ini merupakan bagian dari tren di kawasan Asia-Pasifik. Diketahui negara-negara Asia Pasifik meningkatkan perhatiannya pada masalah keamanan dan meningkatnya anggaran militer mereka sebagai reaksi langsung terhadap aktivitas Beijing yang kian agresif terhadap negara tetangganya di kawasan maritime.

Peningkatan anggaran belanja ini adalah bentuk *balance of threat* Taipei terhadap Beijing. Taiwan merasa terancam terhadap aktivitas militer China di wilayah perbatasan, sehingga pembelian senjata terus dilakukan dan ditingkatkan sebagai bentuk pencegahan. Menjadi negara yang begitu dekat dengan China secara geografis dan berusaha memisahkan diri dari daratan China tentu menjadi alasan utama potensi agresi China terus berlanjut.

AS memasok lebih dari 99 persen impor persenjataan Taiwan pada tahun 2019-2023 (“Asia Times,” 2024). The Security Assistance Monitor memperkirakan bahwa Taiwan merupakan penerima penawaran tertinggi kedua untuk penjualan senjata AS pada tahun 2019 dan penerima tertinggi kelima pada tahun 2020 (“Forum on the Arms Trade,” 2024).

Selain menjalin kerjasama dengan AS, Taiwan diketahui juga menjalin kerjasama dengan Singapura dibawah Project Starlight. Setelah Singapura berpisah dari Malaysia dan menjadi negara merdeka pada tahun 1965, Singapura meminta bantuan Taiwan untuk melatih angkatan bersenjataanya. Singapura kekurangan lahan untuk latihan militer, termasuk simulasi perang, dan Kuomintang yang berkuasa di Taiwan memiliki ideologi anti-komunis yang sama dengan Singapura dan memiliki pengalaman tempur dalam Perang Saudara China.

Setelah Singapura menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada Oktober 1990, Singapura masih mempertahankan kerja sama militer Starlight Project dengan Taiwan. Singapura terus menekankan hubungan resminya dengan Beijing dan mungkin telah meyakinkan Beijing bahwa program pelatihannya dengan Taiwan tidak akan mengubah sikap resminya. Namun, karena Singapura telah melakukan pelatihan militer di Australia, Brunei, Thailand, Selandia Baru, dan tempat-tempat lain, jumlah pasukan Starlight yang berlatih di Taiwan telah berkurang dari sekitar 10.000 orang di tahun-tahun awal menjadi sekitar 3.000 orang per tahun (Chang, 2020). Selain itu, angkatan bersenjata Singapura juga sekarang menjalin komunikasi yang lebih besar dengan tentara China, yang dapat mengubah hubungan pertahanan Taiwan yang erat dengan Singapura. Jika pemerintah Singapura memutuskan untuk menanggukuhkan Proyek Starlight dengan Taiwan di masa depan, hal ini akan menjadi pukulan telak bagi Taipei dan mengakhiri ikatan historis antara kedua pemerintah. Adapun, kekuatan militer Taiwan masih kalah jauh dibanding dengan China. Baik dari segi kualitas

dan kuantitas, Taipei masih tertinggal jauh dari Beijing. Grafik dibawah ini akan menjelaskan komparasi kekuatan militer yang dimiliki oleh China dan Taiwan:

COMPARISON BRIEF				
✓		Military Power		✗
✓		Air Power		✗
✓		Land Power		✗
✓		Naval Power		✗
✓		Int. Resources		✗
✓		Financials		✗
✓		Logistics		✗
✗		Geography		✓

Grafik 2: Perbandingan Kekuatan Militer China dan Taiwan Tahun 2024

Kekuatan ekonomi dan dominasi China beserta kebijakannya dalam One China Policy sukses membuat Taiwan kesulitan untuk mendapat pengakuan internasional. Taiwan secara de facto dapat dikatakan sebuah negara karena memiliki pemerintahan dan birokrasi, wilayah, dan juga penduduk. Ini membuktikan bahwa Taiwan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka dalam konteks kedaulatan eksternal. Namun dalam sistem internasional, kedaulatan sebuah negara harus diakui oleh negara lain, terutama negara superpower. Ini merupakan masalah untuk Taiwan, karena hingga saat ini hanya 15 negara yang mengakui kedaulatan Taiwan yakni Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Marshall Islands, Haiti, Palau, Nauru, Kingdom of Eswatini, Belize, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Tuvalu, Vatican City State (Ahzani, 2021).

Walaupun telah diakui oleh negara-negara tersebut, Taiwan masih membutuhkan pengakuan dari negara adidaya seperti anggota Dewan Keamanan Tetap PBB untuk dapat diakui sebagai sebuah negara. Disisi lain, Taiwan memiliki hubungan substantif dengan banyak negara lain seperti Australia, Kanada, negara-negara Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.

Minimnya pengakuan dari negara lain disebabkan karena tekanan dari China. China yang dikategorikan sebagai negara superpower memiliki kemampuan lebih untuk menekan negara lain agar tidak memiliki hubungan dengan Taiwan dan mengakui Taiwan sebagai bagian dari China. Beijing juga memiliki sumber daya yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan Taipei sehingga harmonisasi dengan China jauh lebih menguntungkan.

Pada rentang tahun 1900-an hingga tahun 2000-an, Taiwan dan China berlomba lomba ‘membeli’ pengakuan negara lain (*checkbook diplomacy*) dengan memberikan *-aid packaging*. Namun setelah Tsai Ing-wen terpilih, ia merubah kebijakan luar negeri Taiwan dan memperkenalkan pendekatan diplomasi yang baru. Dibawah Tsai, *checkbook diplomacy* dihapuskan. Tsai menilai kebijakan ini tidak strategis bagi Taiwan melihat perbandingan

kontribusi PDB terhadap ekonomi dunia antara Taiwan dan China tahun 2019 yakni 0,50% banding 11,81%. Tsai juga dengan tegas akan mencabut aid packaging bagi negara-negara yang memiliki hubungan diplomasi resmi dengan China (Ahzani, 2021). Taiwan melihat bahwa harmonisasi hubungan dengan negara lain dapat secara perlahan membantu Taiwan untuk mendapatkan pengakuan. Oleh sebab itu Taiwan aktif melakukan kerjasama dengan berbagai negara. AS dan Taiwan tidak hanya memiliki kedekatan dalam ranah keamanan dan pertahanan, namun hubungan ini semakin meluas dengan mencakup berbagai bidang. TRA yang disahkan oleh Kongres AS pada tahun 1979, terus memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama Taiwan-AS tanpa adanya hubungan diplomatik formal.

AS telah berulang kali menegaskan kembali komitmen keamanannya kepada Taiwan di bawah TRA dan Six Assurances. Pada tahun 2018, Taiwan Travel Act disahkan dengan suara bulat oleh Kongres AS dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden AS saat itu, Donald J. Trump. Undang-undang ini mendorong kunjungan pejabat di semua tingkatan dari kedua belah pihak, menggarisbawahi dukungan yang kuat untuk Taiwan dari cabang eksekutif dan legislatif pemerintah AS (“Government Portal of Republic of China (Taiwan),” n.d.).

Pada tahun 2020, Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act (TAIPEI Act) juga disahkan oleh Kongres AS dan ditandatangani menjadi undang-undang, yang menyatakan dukungan AS untuk aliansi diplomatik Taiwan di seluruh dunia dan partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional. Pada tahun 2021, pemerintahan Biden menegaskan kembali komitmen AS terhadap Taiwan dengan menerbitkan pedoman baru untuk mendorong interaksi yang lebih besar antara AS dan Taiwan. Selanjutnya, pemerintah AS menandatangani National Defense Authorization Act (NDAA) untuk tahun 2023-2024. Undang-undang itu menggabungkan kebijakan dan inisiatif untuk membantu Taiwan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan diri dan memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan regional. Ketika Taiwan dan AS terus memperluas luasnya kerja sama mereka, kemitraan bilateral mereka telah berkembang menjadi salah satu kerja sama global (“Government Portal of Republic of China (Taiwan),” n.d.).

Didasari oleh TRA, AS dan Taiwan membuka peluang kerjasama dalam cakupan yang lebih luas lagi. Melalui American Institute in Taiwan (AIT), sebuah organisasi non-pemerintah yang diberi mandat oleh Taiwan Relations Act untuk melaksanakan hubungan tidak resmi AS dengan Taiwan. AIT memberikan layanan warga negara dan konsuler yang serupa dengan yang ada di pos-pos diplomatik. Departemen Luar Negeri AS memiliki kontrak dengan AIT dan mendanai sebagian besar operasi AIT. Taiwan juga memiliki

Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei di AS (TECRO) di Washington, DC. Taiwan memiliki perwakilan di seluruh AS melalui Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei (TECO) (US Department of State, 2022).

Hubungan antarwarga antara AS dan Taiwan sangat kuat dan terus berkembang. Hingga tahun 2019, perjalanan bisnis dan wisata dari Taiwan ke AS telah meningkat 70 persen sejak Taiwan menjadi anggota U.S. Visa Waiver Program pada bulan November 2012. Kerjasama ini menjadikan Taiwan sebagai satu-satunya negara tanpa hubungan diplomatik dengan AS yang mendapat kesempatan tersebut. Taiwan adalah sumber pelajar internasional terbesar ketujuh di AS, mengirimkan lebih dari 20.000 pelajar untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi setiap tahun selama tiga dekade menjelang pandemi. AS juga mensponsori kesempatan belajar di luar negeri di Taiwan untuk siswa AS dari tingkat sekolah menengah hingga pascasarjana, dengan fokus khusus pada pembelajaran bahasa Mandarin (US Department of State, 2022). Upaya pengenalan budaya dan bahasa ini dilihat mampu sebagai upaya mengenalkan Taiwan kepada masyarakat AS.

Tsai juga memanfaatkan perang dagang antara AS-China dengan menjalin kerjasama dagang dengan AS yang meningkatkan angka ekspor Taiwan sebesar 2% di tahun 2019. Kerjasama ini juga didukung Kementerian AS dengan mempromosikan investasi ke Taiwan kepada perusahaan besar AS.

Tidak pernah ada pernyataan resmi yang mengatakan bahwa AS mendukung kemerdekaan Taiwan, namun berbagai dukungan terhadap Taiwan dilakukan, meliputi kerjasama TTA (Taiwan Travel Act), masuknya Taiwan pada agenda NDAA (National Defense Authorization Act), dan AIT (American Institute in Taiwan) (Chen, 2019). Melalui berbagai kebijakan tersebut, secara tidak langsung AS telah mengatakan bahwa Taiwan adalah mitra penting mereka. Melalui berbagai kerjasama ini, profil Taiwan sebagai sebuah entitas yang merdeka semakin terlihat.

Tidak hanya itu, Taiwan juga mengembangkan hubungan bilateralnya dengan Jepang menuju harmonisasi yang lebih kuat. Hal ini ditunjukkan oleh penggantian nama kantor perwakilan masing-masing pada tahun 2017. Dari yang semula Taiwan's Association of East Asian Relations menjadi Taiwan-Japan Relations Association. Kemudian dalam Buku Biru Diplomati Jepang tahun 2020, Taiwan diklasifikasikan sebagai mitra yang sangat penting, sementara Jepang adalah pendukung yang tak tergoyahkan untuk partisipasi internasional Taiwan serta pendukung setia perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan ("Government Portal of Republic of China (Taiwan)," n.d.). Dengan hubungan antara Taiwan dan Jepang yang menguat, tentunya ini berdampak pada isu keamanan regional khususnya Asia Timur.

Selanjutnya, Taiwan dan Uni Eropa, bersama dengan negara-negara Eropa lainnya, telah mengembangkan kerja sama yang erat dan pertukaran di berbagai bidang. Taiwan dan Uni Eropa telah memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan mereka yang kuat dan dinamis, dan kedua belah pihak meningkatkan kerja sama di sektor-sektor yang sedang berkembang seperti energi hijau, teknologi baru, transformasi digital, dan restrukturisasi rantai pasokan. Taiwan dan Uni Eropa juga memperluas kerja sama di bidang hak asasi manusia melalui *Taiwan-EU Human Rights Consultations*, kedua belah pihak bekerja sama dalam topik-topik yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama, termasuk kesetaraan gender, hak LGBTI, dan hak-hak pekerja migran. *The EU-financed European Business and Regulatory Cooperation* (EBRC) yang didanai oleh Uni Eropa memasuki tahap kedua pada bulan Oktober 2018. EBRC telah dirancang khusus untuk Taiwan, dengan tujuan meningkatkan kerja sama regulasi antara Uni Eropa dan Taiwan serta meningkatkan visibilitas dan proyeksi keunggulan Eropa di Taiwan. Berdasarkan kesuksesan empat tahun sebelumnya, EBRC terus mendanai acara dan proyek lokal yang bertujuan untuk memfasilitasi koherensi peraturan dan kolaborasi bisnis dengan Taiwan dan kawasan ("European Economic and Trade Office in Taiwan," 2021). Aktivitas ini meningkatkan harmonisasi antara Uni Eropa dan Taiwan, yang selanjutnya menyentuh situasi di Selat Taiwan.

Pada bulan Oktober 2021, Parlemen Eropa mengadopsi laporan tentang hubungan dan kerja sama politik UE-Taiwan untuk pertama kalinya, diikuti dengan resolusi tentang situasi di Selat Taiwan pada bulan September 2022 ("Government Portal of Republic of China (Taiwan)," n.d.). Ini membuktikan bahwa masyarakat Eropa yang diwakili oleh elit politik dalam organisasi ini mulai sadar dengan masalah di Selat Taiwan.

Diplomasi yang dilakukan oleh Taiwan ke kawasan Eropa membawa angin sejuk dalam perluasan kesadaran bahwa Taiwan merupakan negara yang indepedan dan tidak berada dibawah otoritas China. Hubungan yang dimulai dari ketertarikan investasi, perdagangan, hingga isu sosial kini secara perlahan menyentuh masalah keamanan dan batas wilayah sesuai dengan resolusi Uni Eropa tentang situasi di Selat Taiwan pada bulan September 2022. Ini pada gilirannya berpeluang menjadi kerjasama keamanan.

Tidak hanya melakukan pendekatan diplomasi ke Barat, Tsai juga berusaha mendekati negara tetangga Asia-nya. Tsai meluncurkan kebijakan New Southbound Policy. Kebijakan ini berusaha mendekatkan Taiwan dengan 10 negara anggota ASEAN, Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia dan Selandia Baru dalam hal kerja sama ekonomi dan perdagangan, pengembangan talenta, berbagi sumber daya dan hubungan regional. Tujuan jangka

panjangnya adalah untuk menciptakan jenis kerja sama baru yang didasarkan pada manfaat bersama. Melalui kebijakan ini, Taiwan berharap dapat memulai negosiasi dan dialog yang lebih luas dengan negara-negara tersebut. Kebijakan ini juga dibentuk untuk mengurangi hingga menghilangkan ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap China (Black, 2019).

Negara-negara ASEAN tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Taiwan. Mayoritas anggota ASEAN juga mengikuti One China Policy. Namun, hal ini tidak menghentikan pertumbuhan investasi langsung dan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara ASEAN dan Taiwan. Hal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk "Meningkatkan Investasi Taiwan di ASEAN", yang diselenggarakan secara daring oleh The Habibie Center pada 2021. Dalam forum tersebut ditekankan bahwa nilai yang menentukan kerja sama Taiwan dengan ASEAN adalah fleksibilitas dalam investasi serta peningkatan kualitas dan produktivitas ("Taiwan Streams Investment to Southeast Asia," 2021). Berdasarkan data dari pemerintah Taiwan, pada periode 2002-2015, investasi Taiwan di China mencapai 60%. Namun, sejak tahun 2016, jumlah tersebut menurun menjadi 50%. Bahkan, per semester pertama 2021, modal Taiwan di China hanya 25% ("Taiwan Streams Investment to Southeast Asia," 2021).

Strategi lainnya yang dilakukan Tsai demi mendapatkan pengakuan internasional adalah dengan pemberian ODI (Outward direct investment) atau dana bantuan kepada beberapa negara. Pemberian ODI ini dilakukan agar Taiwan dilihat sebagai negara yang memberikan kontribusi pada ekonomi internasional. Selama masa pemerintahan pertama Tsai Ing-wen (2016-2019), Taiwan telah memberikan dana untuk ODI sebesar kurang lebih 59,417 juta USD (Ahzani, 2021).

Selanjutnya, Taiwan tidak meremehkan organisasi internasional dan tetap aktif menghadirkan dirinya dalam berbagai kesempatan. Suntikan dana dari Taiwan untuk kontribusi ekonomi internasional juga terlihat pada The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu, menyumbang kurang lebih 150.000 USD untuk membantu negara-negara berkembang dalam Ministerial Conference-12 tahun 2020 (Lohman, 2021). Frederick Agah selaku Wakil Direktur Jendral World Trade Organization (WTO) merespon dengan sangat baik. Tindakan tersebut adalah upaya Taiwan mempertegas posisinya sebagai negara yang berkontribusi bagi negara-negara berkembang dan merupakan aktor di dalam WTO (Ahzani, 2021).

Kebijakan dalam negeri yang kuan membentuk posisi Taiwan sebagai induk industri semikonduktor yang pada gilirannya menempatkan Taiwan pada posisi yang tidak bisa diremehkan dalam sistem internasional. Kehilangan Taiwan berarti menghatarkan dunia

pada depresi ekonomi lantaran rantai pasokan akan kacau. Kepiawaian Tsai Ing-wen dalam memainkan peran secara global melalui diplomasi dan kebijakan luar negeri juga berkontribusi pada pengakuan-pengakuan samar yang perlahan mulai membuahkan hasil.

Status Quo merupakan jalan tengah yang dipilih Taiwan maupun AS untuk menghindari konfrontasi China. Secara berkala begitu vokal menyuarakan kemerdekaan Taiwan, Tsai dan partainya, DPP, memicu ketegangan di Selat Taiwan. Sejarah panjang antara kedua negara yang tidak lepas dari perbedaan dua ideologi kelompok paling berpengaruh se-daratan China pada masa itu mengantarkan kedua wilayah ini bersilih paham hingga kini.

Sejak dulu mengeluarkan kebijakan One China Policy, China berusaha mendapatkan kembali Taiwan. Hal ini dipengaruhi juga oleh SDM Taiwan yang tinggi serta kemajuan ekonomi yang pesat. Adapun Taiwan berusaha memihisakan diri dari China didasarkan perjuangan historis pendiri pulau tersebut. Secara de facto tentu Taiwan telah menjadi negara berdeka, namun sebuah negara membutuhkan pengakuan dari negara lain, terutama negara superpower yang dalam hal ini masih menjadi masalah utama dan terus diperjuangkan oleh Taiwan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Walaupun telah berpisah puluhan tahun yang lalu, hubungan Taiwan dan China masih diliputi konflik dari awal kemunculan Taiwan hingga Taiwan menjadi salah satu produsen semikonduktor terbesar di dunia. Perbedaan ideologi menjadi dasar dari perang saudara yang pecah di daratan utama China pada tahun 1940-an. Melibatkan dua kelompok, PKT dengan ideologi komunis melawan KMT yang beraliran nasionalis. Perang ini menjadi awal pembentukan negara baru yang tidak pernah terbayangkan masih akan terus berselisih dengan China dan masih melibatkan dua ideologi yang berbeda.

Konflik didasari pada pengakuan China bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya. China menganggap Taiwan merupakan provinsi pemberontak dan pulau tersebut tidak boleh dilepaskan. Namun disatu sisi, Taiwan melihat Beijing bukanlah bagian dari Taipei.

Ketegangan Selat Taiwan terus meningkat. Hal ini dipicu oleh terpilihnya pemimpin Taipei dari Partai Demokrasi Progresif (DPP). DPP memiliki keinginan yang berbeda dari partai paling populer sebelumnya di Taiwan, KMT. Bila KMT terlalu bermain aman dengan isu ini melalui hubungan yang baik dengan China, DPP mengambil langkah berani dengan rutin menyuarakan bahwa Taiwan adalah negara merdeka. Isu kemerdekaan inilah yang

menjadi warna khas dari DPP dan menjadikan DPP untuk pertama kalinya mendominasi legislatif Taiwan pada tahun 2016.

Tsai dan DPP terlalu vokal dalam menyuarakan Taiwan sebagai negara yang berdaulat. Hal ini memicu ketegangan konflik yang kian intens di Selat Taiwan, berbatasan langsung dengan China. Aktivitas militer China dilaporkan meningkat setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya anggaran militer Taiwan. Aktivitas militer yang semakin meningkat hingga jumlah kapal dan jet tempur China yang melintas menjadi ancaman bagi kedaulatan dan keamanan Taiwan. Sadar tidak memiliki kapasitas yang mumpuni bisa konfrontasi China semakin intens dan sebagai upaya pencegahan dan penyeimbangan ancaman, Taiwan mencari perlindungan dari negara yang bisa menyamai China. Melalui kerjasama dengan AS, Taiwan menyeimbangkan ancaman tersebut.

Aliansi militer antara AS dan Taiwan terus meningkat. Walaupun tidak memiliki hubungan diplomasi resmi, namun AS menyatakan bahwa Taiwan merupakan rekanan yang penting bagi Washington. Hal ini tentunya dilandasi berbagai kepengingan AS terhadap pulau ini. Ditinjau dari sejarah, AS memiliki kepentingan untuk membendung pengaruh ideologi komunis Rusia yang pada masa perang dingin merupakan musuh utama AS, sehingga AS mulai melakukan normalisasi hubungan dengan China sebagai salah satu negara dengan ideologi komunis yang mampu menandingi Rusia. Namun, pembendungan ideologi tersebut juga membutuhkan negara dengan ideologi yang mirip dengan AS. Taiwan pada masa itu adalah rekanan yang sempurna. Ikut campur AS di wilayah ini juga menjadi pembuktian kedudukan AS sebagai negara superpower dan pembawa perdamaian. Kehilangan Taiwan akan menjadi mimpi buruk bagi ekonomi AS dan dunia. Keruntuhan ekonomi di AS dapat menyebabkan efek domino secara global.

Taiwan juga meningkatkan anggaran militer dan pengeluaran militernya setiap tahun. Taipei juga telah memproduksi kapal selam, kapal tempur, hingga pesawat tempur. Hal ini mengindikasikan bahwa Taiwan serius dengan ancaman yang datang dari China dan itu merupakan upaya penyeimbangan ancaman.

Kemudian, dalam upaya gain recognition, Taiwan aktif melakukan diplomasi dan mengubah arah kebijakan luar negerinya. Penghapusan checkbook diplomacy adalah langkah yang diambil Tsai dalam menunjukkan ketegasannya pada negara-negara yang setengah hati menyatakan kemerdekaan Taiwan. Dana bantuan kini hanya diberikan Taiwan untuk negara yang mengakui kemerdekaan Taiwan. Adapun Southbound Policy yang ditujukan untuk mendekatkan Taiwan dengan ASEAN, Asia Selatan, Australia dan Selandia Baru juga

menjadi ciri khas masa kepemimpinan Tsai. Secara bertahap, Tsai telah mengenalkan Taiwan sebagai merdeka ke negara-negara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Quo merupakan jalan tengah yang dibutuhkan semua pihak terlibat. Dengan berjalanya status quo, kedamaian kawasan akan terus terjaga dan terhindar dari perang. Penulis melihat bahwa kehadiran AS dalam konflik ini sangat dibutuhkan. Kerjasama militer dalam penjualan senjata dengan Taiwan yang telah ada lama namun kemudian diperbarui dan terus dipertahankan hingga kini telah menjadi bukti komitmen AS terhadap kedaulatan Taiwan. Namun bila perang pecah di kawasan ini, AS tentunya tidak akan senang, mengingat perang Ukraina telah menghabiskan banyak sumber daya Washington.

Penulis mengharapkan Taiwan untuk terus melakukan diplomasi nya dan membentuk kebijakan luar negeri yang dapat meningkatkan kemampuan pertahanan diri dari ancaman luar. Kolaborasi dalam industri pertahanan hingga kolaborasi latihan militer harus terus dijaga dan ditingkatkan oleh Taiwan. Kebutuhan akan senjata ofensif juga harus mulai diproduksi sendiri bila tidak memungkinkan untuk dibeli dari negara lain terutama AS.

DAFTAR REFERENSI

- Ahzani, W. K. F. (2021). Upaya pemerintahan Tsai Ing-Wen melawan tekanan One-China Principle pada era Xi Jinping. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.252>
- Black, L. (2019). Evaluating Taiwan's New Southbound Policy. *Asian Survey*, 59(2). <https://doi.org/10.1525/as.2019.59.2.246>
- Chang, I. J. (2020). Taiwan's military ties to Singapore targeted by China. Global Taiwan Institute. <https://globaltaiwan.org/2020/05/taiwans-military-ties-to-singapore-targeted-by-china/>
- Chen, D. P. (2019). The Trump administration's One-China policy: Tilting toward Taiwan in an era of U.S.-PRC rivalry? *Asian Politics & Policy*, 11(2). <https://doi.org/10.1111/aspp.12455>
- Curtis, J., & King, W. (2023). Taiwan: Relations with China (pp. 55).
- Dotson, J. (2023). Taiwan announces an increased defense budget for 2024. 8(18), 5.
- European Economic and Trade Office in Taiwan. (2021). The European Union and Taiwan. https://www.eeas.europa.eu/delegations/taiwan/european-union-and-taiwan_en?s=242
- Forum on the Arms Trade. (2024). U.S. arms sales to Taiwan. <https://www.forumarmstrade.org/ustaiwan.html>
- Gettings, J. (2020). Key events in Taiwanese history from World War II to the present. Timeline: Taiwan. <https://www.infoplease.com/history/world/timeline-taiwan>

- Gordon, S. M., Mullen, M. G., & Sacks, D. (2023). U.S.-Taiwan relations in a new era. Council on Foreign Relations.
- Government Portal of Republic of China (Taiwan). (n.d.). Foreign affairs. https://www.taiwan.gov.tw/content_5.php#:~:text=The%20government%20is%20committed%20to,value%20of%20freedom%20and%20democracy.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics*, 30(2), 167–214. <https://doi.org/10.2307/2009958>
- Jervis, R. (2017). *Perception and misperception in international politics: New edition*. Princeton University Press.
- Legarda, H., & Nouwens, M. (2018). *China global security & Taiwan*. International Institute for Strategic Studies (IISS).
- Lohman, W. (2021). Back to basics on Taiwan's participation in international organizations. The Heritage Foundation. <https://www.heritage.org/asia/commentary/back-basics-taiwans-participation-international-organizations>
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics* (1st ed.). Norton.
- Pan, J. (2016). Chinese aircraft fly around Taiwan. *Taipei Times*. <https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2016/12/11/2003660975>
- Shih, S., Silva, K., Kao, D., Lee, S., Chen, Y., & Koo, S. (2021). Why the Chinese military has increased activity near Taiwan. *Common Wealth Magazine*. <https://web.cw.com.tw/taiwan-strait-2021-en/index.html>
- Shusen, W. (2022). Adjustments in U.S. arms sales policy toward Taiwan: Characteristics, trends, and implications. Collaborative Innovation Center of South China Sea Studies.
- Taiwan Document Project. (n.d.). The “Six Assurances” to Taiwan. <http://www.taiwandocuments.org/assurances.htm>
- Taiwan Relations Act. (2022). American Institute in Taiwan. <https://www.ait.org.tw/taiwan-relations-act-public-law-96-8-22-u-s-c-3301-et-seq/#:~:text=An%20Act,Taiwan%2C%20and%20for%20other%20purposes>.
- Taiwan streams investment to Southeast Asia. (2021). FEB UI. <https://feb.ui.ac.id/en/2021/11/08/taiwan-streams-investment-to-southeast-asia/>
- US Department of State. (2022). U.S. relations with Taiwan. <https://www.state.gov/u-s-relations-with-taiwan/>
- Walt, S. (1985). Alliance formation and the balance of world power. *The MIT Press*, 9(4), 3–43. <https://doi.org/10.2307/2538540>
- Walt, S. (1987). *The origins of alliances*. Cornell University Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*.